

## BAB 5

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Hasil penghitungan Indeks Williamson ( $CV_w$ ) di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat disparitas pendapatan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Ini dapat dilihat dari nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 0,60 sampai 0,65. Perkembangan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat berfluktuatif, pada tahun 2003 Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat sebesar 0,6315 dan turun menjadi 0,6189 pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM membuat Indeks Williamson meningkat menjadi 0,6418. Selanjutnya Indeks Williamson cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya sampai pada angka 0,6264 pada tahun 2008. Walaupun secara umum Indeks Williamson cenderung menurun namun penurunan indeks tersebut relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya berhasil.
2. Disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil analisis regresi data panel, diperkirakan dipengaruhi oleh rasio guru terhadap murid, jumlah tenaga medis/dokter, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan jumlah alokasi investasi. Sedangkan jumlah sarana pendidikan, dan panjang jalan tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
3. Berdasarkan analisis LPE dan PDRB per kapita (Tipologi Klaasen), daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi:
  - a) Kabupaten/kota sejahtera (kuadran 1) terdiri dari tiga kabupaten/kota yaitu Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kota Bandung.

- b) Kabupaten/kota maju tetapi tumbuh lamban (kuadran 2) terdiri dari empat kabupaten/kota yaitu Kab. Indramayu, Kab. Purwakarta, Kota Cirebon dan Kota Cimahi.
  - c) Kabupaten/kota relatif tertinggal (kuadran 3) terdiri dari 14 kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Subang, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
  - d) Kabupaten/kota berkembang cepat (kuadran 4) terdiri dari empat kabupaten/kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi dan Kota Depok.
4. Hasil plot posisi masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klaasen menunjukkan bahwa daerah yang relatif tertinggal (LPE yang rendah dan PDRB per kapita yang rendah) terletak jauh dari pusat kota (daerah pinggiran). Adapun daerah dengan LPE yang tinggi dan PDRB per kapita yang tinggi atau salah satu diantaranya cukup tinggi berada di sekitar/dekat pusat kota kecuali Kota Cirebon.
  5. Rata-rata rasio guru terhadap murid di daerah yang sejahtera (kuadran 1) lebih kecil (berkisar antara 0,0276 sampai 0,0424) dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedangkan rata-rata rasio guru terhadap murid yang paling tinggi berada di daerah yang relatif tertinggal (kuadran 3) berkisar antara 0,0257 sampai 0,0578.
  6. Rata-rata jumlah tenaga medis/dokter paling tinggi berada di daerah yang sejahtera (kuadran 1) sebesar 150 orang, selanjutnya diikuti oleh daerah yang berkembang cepat (kuadran 4) sebesar 127 orang, daerah maju tetapi tumbuh lamban (kuadran 2) sebesar 76 orang dan yang paling kecil berada di daerah yang relatif tertinggal (kuadran 3) sebesar 9 orang.
  7. Rata-rata nilai TPAK di daerah berkembang cepat (kuadran 4) mempunyai nilai lebih rendah (45,92%) dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedangkan rata-rata nilai TPAK yang paling tinggi berada di daerah yang relatif tertinggal (kuadran 3) dengan nilai sebesar 59,78%.

8. Rata-rata alokasi investasi yang paling tinggi berada di daerah sejahtera (kuadran 1) dimana nilai rata-rata alokasi investasi tersebut mencapai angka triliunan rupiah diikuti oleh daerah berkembang cepat (kuadran 4) dengan nilai rata-rata alokasi investasi sekitar 500 milyar rupiah, daerah maju tetapi tumbuh lamban (kuadran 2) dengan nilai rata-rata alokasi investasi sekitar 200 milyar rupiah dan yang paling kecil berada di daerah yang relatif tertinggal (kuadran 3) dengan nilai rata-rata alokasi investasi di bawah 200 milyar rupiah.

## **5.2. Rekomendasi Kebijakan**

1. Berdasarkan kesimpulan bahwa rasio guru terhadap murid dan jumlah dokter/paramedis mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka untuk mengurangi ketimpangan/disparitas pendapatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan jumlah dan penyebaran tenaga pengajar dan dokter/paramedis tersebut berdasarkan luas wilayah maupun jumlah penduduk yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan akan lebih mudah dan terlayani dengan baik.
2. Berdasarkan kesimpulan bahwa TPAK mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka penyediaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya baik dengan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berorientasi pada program padat karya maupun perluasan dari lapangan kerja sebelumnya merupakan kebijakan untuk mengurangi pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional secara agregat.
3. Berdasarkan kesimpulan bahwa jumlah investasi mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan cara memberikan insentif bagi para pengusaha agar tertarik menanamkan

investasinya di daerah, bentuk insentif tersebut dapat berupa kemudahan dalam mendirikan usaha baru. Selain itu investasi yang dilakukan harus mencermati sektor ekonomi yang mana yang perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah untuk memperkecil kesenjangan aktivitas perekonomian antar kabupaten/kota.

